

KEMUNCULAN ORIENTASI POLITIK DAN GAGASAN KEBANGSAAN, BALI AWAL ABAD KE-20

Uji Nugroho W

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya UGM Yogyakarta
Kontak: u.n.winardi@ugm.ac.id

Abstraksi

Perkembangan nasionalisme pada paruh pertama abad ke-20 sering dianggap sebagai hasil dari komitmen bersama yang berjalan linear dengan kemunculan elit modern Indonesia. Kajian ini mengeksplorasi orientasi politik dan gagasan kebangsaan yang berkembang di Bali untuk menunjukkan adanya partikularitas dalam merespon perkembangan nasionalisme Indonesia. Meskipun kelompok elit terdidik di Bali cukup giat dalam mensuarakan gagasannya mengenai kemajuan, orientasi politik mereka condong ke dalam menyangkut tentang persoalan domestik. Tulisan ini berargumen bahwa ada kompleksitas dari dalam masyarakat Bali menyangkut kasta, adat dan tradisi yang tidak tertembus oleh ide-ide modern.

Kata kunci: Bali, Orientasi politik, gagasan kebangsaan, pergerakan.

THE EMERGENCE OF THE POLITICAL ORIENTATION AND THE NATIONAL CONSCIOUSNESS, BALI EARLY TWENTIETH CENTURY

Uji Nugroho W

Abstract

The development of nationalism in early 20th century is commonly presumed as a result of commitment which run linear with the emergence of the Indonesian modern elites. This research explores political orientation and national consciousness surfacing in Bali to explain particularities responding the rise of the Indonesian nationalism. Although the Balinese-educated-elites were fairly active in articulating their ideas of progress, they had very much inward orientation which mainly concerned with local/domestic issues. This article eventually argues that the main problem revolves around the complexity of its society related with caste system, custom and tradition that remained impenetrable by the modern ideas.

Keywords: Bali, political orientation, national consciousness, movement

I. PENDAHULUAN

Perkembangan gerakan kebangsaan Indonesia kerap dipahami berproses melalui dua fase. Pertama berupa gerakan yang bersifat kedaerahan yang berorientasi pada nasionalisme etnis dan kemudian berkembang menjadi gerakan nasional yang berorientasi pada pembentukan bangsa yang merdeka. Historiografi Indonesia memberi penekanan penting pada kemunculan gagasan kebangsaan di awal abad ke-20 ini sebagai puncak perlawanan terhadap kolonialisme. Salah satu bentuknya diartikulasikan melalui Sumpah Pemuda suatu komitmen ikonik untuk mensimbolkan kesepahaman untuk bertanah air, bahasa dan berbangsa yang satu. Proses ini dimaknai sebagai suatu keberhasilan dalam menyatukan berbagai perbedaan dan meformulasikan identitas bersama. Semenjak itulah gagasan mengenai Indonesia ditafsirkan seragam sebagai wacana anti kolonial.

Permasalahannya dengan keanekaragaman yang ada, tidak semuanya tersambung pada komitmen tentang bangsa yang sama. Orientasi politik selama masa pergerakan nasional ternyata juga tidak tunggal dan gagasan kebangsaan Indonesia dipersepsikan secara beragam. Tidak semua gerakan mengusung wacana anti kolonial bahkan tidak semuanya pula

berorientasi kepada bangsa. Henk Schulte Nordholt, misalnya, membuktikan adanya keragaman orientasi politik kelas menengah Indonesia, kelompok yang disebut-sebut berperan penting dalam memunculkan gagasan kebangsaan (Nordholt 2011: 43557). Tidak semua dari mereka berorientasi pada politik kewarganegaraan. Terdapat pula irisan dalam kelas menengah Indonesia yang lebih tertarik dengan modernitas. Bagi mereka, bangsa bukanlah orientasi utama mereka melainkan gaya hidup, dengan menggunakan kemajuan pendidikan dan konsumsi untuk menyingkirkan tradisi lama untuk menjadi warga baru, secara kultural, dari negara kolonial (Nordholt, 2011: 43840).

Lebih lanjut, Robert Elson menuliskan 'apa yang dimaksud dengan Indonesia, atau bagaimana Indonesia seharusnya diurus masih saja menyisakan ketidakjelasan, dan para nasionalis Indonesia tidak pernah berdebat secara serius untuk mengkompromikan permasalahan ini' (Elson, 2008: 97). Gagasan tentang Indonesia menjadi ajang kontestasi berbagai ide dan penafsiran yang menunjukkan adanya beragam orientasi mengenai bangsa semakin terlihat pada pertengahan abad ke-20.

Bukti lain akan adanya perbedaan orientasi politik dan gagasan kebangsaan yang beragam terlihat jelas pada awal masa kemerdekaan. Sebagai sebuah komitmen bersama, gagasan kebangsaan yang dibangun di bawah bayang-bayang kolonialisme memperoleh banyak tantangan. Kesuksesan NICA membentuk negara boneka pada masa revolusi fisik menunjukkan adanya berbagai orientasi dan agenda politik yang beragam di antara para elit politik Indonesia. Selain itu, terjadi pula perpecahan di kalangan republikan yang berakar pada persoalan ideologis dalam mentafsirkan gagasan Indonesia seperti yang terlihat pada gerakan komunis Muso di Madiun maupun Kartosuwiryo dengan negara Islamnya. Awal 1950-an, ketika Indonesia memperoleh pengakuan atas kedaulatannya sebagai negara bangsa yang merdeka, persoalan ini juga belum berakhir. Dalam dasawarsa ini, kekecewaan-kekecewaan di tingkat lokal terhadap penguasa pusat bahkan semakin mengkonfirmasi adanya tensi panas antara penguasa pusat dan penguasa daerah (misalkan lihat dalam Van Bemmelen dan Raben [eds.] 2011; Magenda 1991). Pada penghujung dekade yang sama, Indonesia yang semula dijanjikan memberi partisipasi seluas-luasnya pada seluruh warganya malah memunculkan kekuasaan yang tidak demokratis (Feith, 1962). Pada era ini, Indonesia sebagai sebuah ide kebangsaan yang dihasilkan oleh komitmen bersama sedang dipertarungkan. Persoalan ini bukan hal baru namun telah berakar pada periode awal pergerakan.

Gagasan tentang sebuah bangsa sebagai imajinasi kolektif, dalam konteks ini, tidak dapat bekerja secara sempurna juga tidak bertahan lama. Kebingungan dan ketidakjelasan dalam mempraktekan gagasan kebangsaan pada akhirnya mengkonfirmasi bahwa gagasan kebangsaan Indonesia bisa saja bermuara pada beragam pengalaman dan perbedaan orientasi politik. Begitu pula dengan ide mengenai Indonesia dapat diterjemahkan maupun diartikulasikan secara berbeda-beda. Terlebih lagi dengan mempertimbangkan keragaman di kepulauan nusantara, ide metropolitan mengenai bangsa tidak tersebar secara merata di tingkat lokal. Oleh karenanya, diperlukan cara alternatif untuk memahami kemunculan gagasan kebangsaan Indonesia dengan memberi ruang lebih luas bagi adanya partikularitas yang mungkin tidak terakomodir dalam narasi besar nasional. Sayangnya masih sangat sedikit jikalau ada karya yang mendiskusikan partikularitas semacam ini.

Artikel ini mengkaji dinamika politik lokal di Bali untuk menjelajahi keunikan orientasi politik di tingkat lokal yang mengemuka dalam merespon dan mempersepsikan identitas kebangsaan pada awal abad ke-20. Bali diposisikan sebagai lokus unik yang mengalami fase historis yang tidak paralel dengan yang terjadi, misalkan, di Jawa maupun Sumatra. Bali merupakan salah satu contoh bahwa gagasan metropolitan tentang bangsa tidak tersebar secara merata ke seluruh pelosok Indonesia. Bagi kebanyakan orang di Bali, bahkan setelah

proklamasi sekalipun, Indonesia masih merupakan entitas politik baru yang asing. Pada masa revolusi misalnya, Raja Klungkung berhasil menggalang dukungan sekitar 5000 milisi untuk memerangi sejumlah kecil republikan yang bergerilya di wilayahnya.¹ Keberpihakan raja terhadap NICA didasarkan pada dua kekhawatiran bila menerima Indonesia yakni tunduk kepada Jawa dan kekhawatiran akan diislamkan (Pendit, 2008: 89).

Akar-akar kegamangan dalam mempersepsikan identitas kebangsaan ini sebenarnya telah terlihat semenjak masa pergerakan nasional di awal abad ke-20. Ketika waktu itu para nasionalis Indonesia umumnya beroritasi pada identitas nasional dengan berusaha meninggalkan batas-batas tradisional, gerakan politik di Bali terpolarisasi dan terjebak pada pertentangan primordial berdasarkan pada kasta (Agung, 2001). Di saat yang sama, penciptaan pranata modern gagal terwujud, sedangkan feodalisme semakin menguat (lihat misal Agung, 2009: 258-9). Meskipun tidak semua dinamika lokal yang ada berkaitan langsung dengan perkembangan pergerakan nasional Indonesia, pada tingkat tertentu hal ini merefleksikan kemunculan orientasi politik di tingkat lokal dalam mendefinisikan bangsa. Artikel ini menjelaskan mengapa orientasi politik primordial muncul pada paruh paling progresif dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia.

Terlepas dari banyaknya karya akademik mengenai Bali, masih sedikit yang mencoba menjelaskan partikularitas dalam orientasi politik pada tingkat lokal ketika merespon kemunculan gagasan kebangsaan Indonesia. Kebanyakan karya yang ada meyakini bahwa kemunculan institusi pendidikan, elit terdidik dan organisasi pergerakan lokal yang notabene banyak bergiat di bidang sosial merupakan contoh sempurna dari perkembangan ide nasionalisme Indonesia di tingkat lokal. Pada kenyataannya tidak sesederhana ini. Bahkan nasionalisme Indonesia barang kali merupakan isu yang nyaris absen dari gelanggang perdebatan kelompok pergerakan di Bali.

Selama ini, karya Benedict Anderson *Imagined Communities* (Anderson 1991) telah banyak diadopsi untuk menjelaskan variasi integrasi yang dialami oleh individu maupun kelompok untuk menjadi Indonesia. Pendekatan semacam ini berhasil untuk menjelaskan beberapa kasus seperti yang terjadi di Jawa dan Sumatra yang telah mengalami adanya fase *print capitalism*. Dalam karya Anderson, imajinasi mengenai bangsa memiliki paling tidak dua *avenue* utama yang sulit diterjemahkan secara leluasa pada realitas historis di Bali yakni: (1) sifat yang terbatas (*limited*), dan (2) berdaulat (*sovereign*). Variabel pertama menunjukkan adanya keberagaman spektrum imajinasi mengenai bangsa yang mengizinkan kelompok Hindu di Bali dapat memiliki orientasi yang berbeda dengan kelompok Islam-modernis Minangkabau atau priyayi-abangan di Jawa.² Begitu pula dengan variabel *sovereign*, berakar dari kejayaan *enlightment* dan revolusi yang berhasil menghancurkan nilai-nilai lama seperti legitimasi ilahiah dan hirarki monarki tradisional (Anderson 1991; 20), tidak terjadi di Bali yang cenderung homogen dan tradisi tetap dominan. Dengan demikian, proses integrasi semacam ini hanya akan dialami oleh sejumlah kelompok atau individu yang telah melampaui suatu fase historis tertentu sehingga tidak dialami oleh semua orang atau kelompok. Adapun, bentuk dan derajat komitmen yang dihasilkan melalui proses seperti yang ada dalam *imagined community* juga tidak seragam dan pengaruhnya cenderung bersifat *ephemeral*, terjadi dalam waktu singkat namun tidak bertahan lama.

Clifort Geertz (1980) dan Adrian Vickers (2012) menekankan pada alasan kultural dalam

¹ Pada masa revolusi, NICA menggunakan Bali sebagai bagian penting dalam propaganda, *winnent begint te Den Passer*. Kepercayaan diri NICA berawal sejak diadakannya konferensi Denpasar dan kecenderungan politik sejumlah penguasa tradisional pulau ini untuk menjalin kerja sama kembali dengan Belanda.

² Perbedaan yang didasarkan pada suku dan agama semacam ini akan menghasilkan kontras yang tajam, bahkan untuk tingkatan yang lebih *subtle*, dalam suatu kelompok kecil dengan kesamaan identitas terdapat beragam orientasi yang berbeda seperti yang telah dicontohkan melalui karya Henk Schulte Nordholt (2011).

menjelaskan relasi politik primordial masyarakat Bali yang dianggap sebagai keniscayaan dan bersifat alamiah. Adapun Geoffrey Robinson (2006) dalam karyanya mengenai kekerasan di Bali salah satu referensi utama untuk sejarah politik Bali modern melihat praktek kolonialisme merupakan pengaruh paling kuat dalam meredam kemunculan ide-ide kebangsaan di Bali. Robinson beralasan bahwa pemerintah kolonial yang berorientasi pada penciptaan tata-tentram (*rust en order*) berkecenderungan untuk mengabaikan bahkan memanfaatkan polarisasi yang terjadi dalam masyarakat Bali untuk membuat mereka sibuk mengurus persoalan internal yang berkaitan dengan keaslian tradisi, agama dan budaya (Robinson, 2006: 78). Dengan demikian isu identitas kebangsaan luput dari perhatian masyarakat.

Di sisi yang berbeda, Anak Agung Gde Putra Agung (2001) melalui kajiannya tentang pertentangan kasta menunjukkan pengaruh lain dari kolonialisme yang berperan penting bagi modernisasi masyarakat di Bali Utara. Agung berpendapat bahwa pertentangan kasta menunjukkan relasi sosial yang berubah akibat modernisasi yang berlangsung pada lapisan bawah masyarakat Bali. Westernisasi istilah yang *equivalent* dengan modernisasi yang dihasilkan melalui praktek kolonialisme mampu mengemasipasi masyarakat dari kasta rendah di Bali utara melalui perbaikan dalam bidang pendidikan dan pekerjaan, dan berhasil membuka akses yang lebih luas bagi mobilitas sosial yang relatif lebih cair (Agung, 2001: 138-9).

Meskipun pengaruh kolonialisme cukup signifikan di Bali utara, dalam desertasinya, Anak Agung Gde Putra Agung (2009) mengelaborasi proses negosiasi panjang dalam perubahan birokrasi yang menunjukkan kegagalan penetrasi kolonial secara menyeluruh di Bali. Walaupun kedaulatan dan otoritas utama berada di bawah Batavia, tentakel kolonial tidak dapat mereformasi tradisi dan mendorong terjadinya perubahan (modernitas) yang berarti. Adapun kehadiran negara (kolonial) modern yang membawa sistem administrasi modern selain tidak berakar, dalam banyak hal juga bertentangan dengan gagasan tradisional. Seperti yang diungkapkan pula oleh A.A.G.N Ari Dwipayana (2004), Bali kembali menunjukkan partikularitas dimana nilai-nilai tradisional seperti kekuasaan yang bersifat askriptif tetap bertahan dalam konteks politik modern baik masa kolonial maupun nasional yang menganut meritisme. Oleh karena itulah, kekuasaan tradisional yang dibanyak tempat telah kehilangan signifikansinya dapat kembali muncul dengan cepat di Bali pada era kontemporer.

Dari sekian banyak kontribusi yang telah ada, terdapat pertanyaan yang masih disisakan yakni: mengapa gagasan kebangsaan yang muncul di Bali tidak beranjak jauh dari nasionalisme etnis, dan mengapa pula orientasi politik yang terbentuk cenderung kedalam (*inward oriented*). Untuk menjelaskannya, artikel ini melacak genesis pergulatan politik lokal di Bali pada awal abad ke-20. Kajian ini bertolak dari pemikiran awal mengenai adanya partikularitas sejarah di Bali yang dalam banyak hal menjadikan dinamika sejarah di wilayah ini bergerak melalui alur yang berbeda dengan perkembangan yang ada di tempat lain. Untuk menjawab persoalan tersebut, tulisan ini menggantungkan informasi dan analisis dari koran-koran lokal sebagai sumber utama dan karya historiografi yang ada sebagai acuan kedua.

II. BALI: TINJAUAN GEOPOLITIK

Ketika berkesempatan mengunjungi Bali, Pandit Jawaharlal Nehru pemimpin besar India tidak dapat menyembunyikan kekagumannya atas keindahan pulau ini yang diistilahkan sebagai "*The last paradise, the morning of the world*" (Last, 1955:7). Bali memang telah di kenal dunia sejak lama bahkan pulau ini telah menarik rasa penasaran orang luar, jauh sebelum pameran kolonial *de Orient* di Paris pada 1931. Bukan saja karena keindahan alamnya, melainkan juga karena keunikan masyarakat, eksotisme tradisi dan agamanya.

Adapun Bali seolah hidup pada dua sisi yang berkebalikan. Pulau ini digambarkan sebagai sebuah surga terakhir yang mewakili sisi harmonis cita-cita akan keseimbangan; ketertiban dan keamanan. Sedangkan, di sisi lain, sejak lama Bali dikenal akan ekspor budak dan para petarung tangguh yang memberi ilustrasi salah satu sisi suram dari surga terakhir dimana penindasan dan kekerasan seolah menjadi keniscayaan. Adapun perbudakan merupakan salah satu isu penting dalam memahami sejarah Bali.³ Lebih dari sekedar menunjukkan jumlah budak, hal ini juga menggambarkan bentuk relasi sosial-politik dalam masyarakat tradisional-feodal dan berkasta yang dapat mengkonfirmasi dispotisme sekaligus antagonisme lokal yang kuat, dan di lain sisi peluang mobilitas dan partisipasi populer yang sangat terbatas.

Secara geografis, pulau ini memang berjarak tidak begitu jauh dari Jawa, hanya beberapa mil ke timur yang dihubungkan oleh Selat Bali. Meskipun demikian, jarak politik dan kulturalnya ternyata cukup jauh. Bali ini merupakan salah satu entitas politik lokal yang paling akhir dapat ditundukkan oleh kekuatan kolonial, berbeda dengan Jawa yang praktis setelah 1830 penetrasi kolonial telah berlangsung luas. Bali adalah *enclave* Hindu, agama yang menjadi mayoritas di pulau ini namun minoritas di Indonesia, sekalipun agama ini telah hadir sejak lama di kepulauan nusantara. Masyarakat Bali juga mengenal sistem kasta yang bekerja secara efektif sebagai batas-batas tegas dalam hubungan sosial. Adapun secara historis, penguasa feodal dan institusi adat merupakan elemen sentral dalam menentukan dinamika sosial di Bali. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadikan geopolitik Bali begitu khas. Meskipun demikian terdapat pula paling tidak dua elemen lain yang sangat berpengaruh bagi pembentukan orientasi politik kebangsaan di Bali yakni kegagalan kolonial dalam mereformasi struktur feodal dan absennya otoritas pusat.

III. POLITIK KOLONIAL DAN AKAR-AKAR GERAKAN

Jef Last, seorang pelancong Belanda yang tinggal lama di Bali, merasakan bahwa perkembangan gerakan nasional yang mengkristalkan gagasan kebangsaan tidak mekar dengan baik di pulau ini (Last 1955, 4). Dalam hal ini, Bali berkembang tidak secara paralel dengan Jawa ataupun Sumatera. Semenjak paruh akhir abad ke-19, Jawa mengalami ekspansi ekonomi dengan munculnya banyak perkebunan dan memperoleh manfaat signifikan dari kebijakan politik etis. Di kedua tempat tersebut, pendidikan menjadi sangat berperan bagi pembentukan gagasan kebangsaan terutama melalui kelompok pribumi terdidik yang memiliki orientasi politik kebangsaan (misal lihat dalam Kartodirdjo, 1998; Abdulah, 2012; Van Niel, 1984).

Selain itu, kemunculan kesadaran kebangsaan di Jawa juga dipengaruhi perkembangan kota dan persuratkabaran. Kota memiliki karakteristik yang khas, antara lain adalah sifat yang heterogen dan ikatan primordialisme yang lemah (Abdullah, 2012). Kota merupakan cermin dari kemajuan dimana interaksi yang terbentuk memfasilitasi bermacam ide atau gagasan saling bersinggungan, mempengaruhi dan membentuk sesuatu yang baru. Adapun pers waktu itu merupakan sebuah revolusi dalam bidang komunikasi yang mengubah tradisi lisan (oral) menjadi tradisi tulis (Kartodirdjo 1998).⁴ Bentuk komunikasi dan transformasi ide melalui surat kabar yang luas dan terbuka memungkinkan berbagai informasi global masuk dan

³ Perbudakan merupakan salah satu sumber ekonomi paling menguntungkan penguasa lokal. Nordholt menunjukkan terdapat paling tidak modal untuk menjadikan seseorang sebagai budak antara lain: tahanan perang, berhutang dan narapidana. Perang memang banyak menghasilkan budak, namun kerap juga perang sengaja dilakukan untuk mencari budak. Penguasa juga mensponsori berbagai kegiatan perjudian yang membuat orang berhutang. Begitupula dengan narapidana yang dapat dikeluarkan dari Bali sebagai budak oleh para penguasa. Lihat dalam Nordholt (1996)

⁴ Komunikasi melalui koran juga tersebar lebih luas, terbuka dengan informasi yang relatif utuh dalam penyampaian, berbeda dengan komunikasi lisan yang potensial terpotong.

mempengaruhi masyarakat Indonesia. Berita-berita tentang gerakan nasional seperti yang terjadi di India; Filipina; dan Turki, kemenangan Jepang atas Rusia, maupun Revolusi Sun Yat Sen di Tiongkok menginspirasi sejumlah kelompok progresif Indonesia. Adanya Surat Kabar bumiputra membangkitkan kesadaran kolektif sebagai bangsa sekaligus menjadi ancaman serius bagi penjajah.⁵

Bali tampaknya memiliki pengalaman sejarah yang berbeda dengan Jawa. Komponen-komponen penting bagi penyebaran gagasan kebangsaan seperti yang telah diuraikan di atas tidak semuanya terpenuhi di wilayah ini. Jeff Last mencatat Bali bukan kawasan yang banyak dilirik untuk perkebunan besar, begitupula dengan pengaruh kebijakan Politik Etis yang tidak serta merta memberi perubahan besar dalam masyarakat feodal dan berkasta (Last 1955, 1-7). Selain itu *urbanisme* tidak berlangsung terlalu pesat. Wilayah yang mencirikan perkembangan kota yang maju ada di Singaraja ibukota Buleleng, di bagian utara pulau Bali yang secara geografis merupakan satu jalinan laut dengan Jawa dan Sulawesi.⁶ Bahkan, pemerintah kolonial sama sekali tidak berhasrat mendorong terjadinya *urbanisme* karena dalam imajinasi mereka tentang hal yang paling esensial dari Bali merupakan bentuk dari “republik desa” (*dorpen republiek*) (Nordholt, 1990).⁷

Adapun persuratkabaran di Bali tidak dapat dibidang terbelakang. Pada abad ke-20, di Bali utara terdapat penerbit yang dimiliki oleh orang Eropa. Begitu pula dengan organisasi lokal yang ada pada umumnya juga memiliki media cetak yang menjadi corong aspirasi masing-masing kelompok, diantaranya adalah *Shanti Adjana*, *Suryakanta*, *Bali Adjana*, *Bhawanagara* dan *Djatajoe*. Tulisan yang dimuat dalam terbitan tersebut menjangkau sejumlah isu yang cukup luas yang merespon perkembangan aktual termasuk sejumlah isu global dan tidak hanya tentang Bali, dan mencoba menelaahnya kedalam konteks lokal. Contohnya adalah tulisan yang merespon isu mengenai homoseksualitas (*Djatajoe*, No 11, 25 Juni 1939) dan peran para para ibu (*Djatajoe*, No. 2, 25 September 1939), dan seperti persoalan adat, pendidikan di Bali, hingga asal usul seorang tokoh.

Keberadaan media cetak lokal semacam inilah yang dapat secara jelas mengungkapkan gagasan kebangsaan dan orientasi politik yang mengemuka di Bali pada paruh pertama abad ke-20. Benedict Anderson dalam tesisnya yang sangat terkenal, menunjukkan peran penting surat kabar seperti koran *one day best seller publication* dalam membangun bangsa sebagai sebuah *imagined community* yang mana dari media cetak itulah berbagai macam ide dapat ditransmisikan dan saling mempengaruhi (Anderson, 1991). Hanya saja untuk kasus di Bali, gagasan yang mencuat cenderung berorientasi kedalam terutama pada masalah domestik di Bali yang seolah sama terpisah sekali dengan isu pergerakan nasional waktu itu. Bahkan, kerap kalinya perdebatan yang berlangsung merupakan artikulasi antagonisme kelompok. Selain itu, media cetak sebagaimana halnya dengan organisasinya juga bersikap moderat bahkan tampak afirmatif terhadap penguasa kolonial.

Pengalaman Bali berada di bawah suatu otoritas sentral terbilang pendek sedangkan politik di Bali dicirikan dengan banyaknya pusat-pusat kekuasaan lokal. Setelah berakhirnya kejayaan Kerajaan Gelgel yang menguasai seluruh pulau; sejumlah wilayah di Jawa bagian timur; Lombok dan Sumbawa di awal abad ke-17, Bali merupakan wilayah yang

⁵ Banyak tokoh-tokoh penggerak organisasi nasionalis yang berkecimpung di dunia penerbitan surat kabar diantaranya adalah: Tirtoadisurjo (*Medan Prijaji*, *Soeloeh Keadilan*, *Poetri Hindia*); Wahidin Soedirohoesodo (*Retno Doemilah*); Abdul Rivai (*Bintang Timoer*); H.O.S. Tjokroaminoto (*Goentoer Bergerak*, *Modjopahit*, *de Inder*); Mas Marco Kartodikromo (*Sinar Hindia*); Misbach (*Medan Moeslimin*). Lihat dalam Taufik Rahzen; dkk., *Tanah Air bahasa: Seratus jejak pers Indonesia*, Jakarta: Blora Institute, I:Boekoe, 2007.

⁶ Perkembangan Bali bagian utara erat kaitannya dengan usaha menjadikan Singaraja sebagai ibukota pada masa kolonial.

⁷ Henk Schulte Nordholt melalui karyanya “Staat, Dorp en Ritueel in Bali” menunjukan peran penting dari agensi dalam mengalterasi hubungan yang senantiasa berubah antara negara dengan komunitas lokal (*nagara* atau desa). Kehadiran kekuasaan pusat ke dalam kehidupan lokal yang telah dimulai semenjak 1908 dan dilanjutkan pada masa Indonesia merdeka sangat ditentukan oleh kemampuan negara untuk mengatur dan mencocokkan administrasi desa, adat lokal dan berbagai bentuk ritual publik.

terfragmentasi kedalam sejumlah kerajaan lokal yang tidak lagi disatukan oleh satu otoritas tunggal (Ardika, Parimartha, Wirawan [eds.] 2013; 264-92). Lebih dari itu, riset Nordholt mengenai kerajaan Mengwi, menunjukkan bahwa dalam suatu kerajaan lokal juga ditemui fragmen-fragmen kekuasaan yang membuka peluang bagi menguatnya tensi persaingan dan konflik (Nordholt 1996; 352).

Pada awal abad ke-20, didorong oleh semangat penciptaan *Pax-Neerlandica* pemerintah kolonial Belanda berhasil menancapkan kekuasaannya di pulau ini dan menjadikan wilayah Bali secara menyeluruh sebagai salah satu wilayah terakhir di kepulauan Indonesia yang dijajah oleh Belanda. Penetrasi kolonial sebenarnya sudah berlangsung jauh lebih dahulu sejak pertengahan abad ke-19 baik melalui berbagai strategi kolaborasi dan terutama ekspansi. Pada 1849 dua kerajaan yakni Buleleng dan Jembrana ditundukkan melalui ekspansi militer. Sejumlah kerajaan lain menerima penjajahan tak langsung (*indirect rule*) yakni Karangasem (1896), Gianyar, dan Bangli pada 1917. Ekspansi militer terakhir Belanda pada abad ke-20 berhasil menaklukkan Badung dan Tabanan pada 1906, dan Klungkung yang takluk dalam perang puputan pada 1908.⁸

Selain bertujuan untuk *afrondig politiek* (penciptaan politik-territorial yang bulat) kehadiran Belanda juga berkaitan erat dengan usaha untuk menegakkan ketertiban dan keamanan (*rust en orde*). Batavia melihat Bali sebagai salah satu contoh paling baik akan despotisme lokal, dimana penguasa feodal mempraktekan kekuasaannya secara tak terbatas yang diyakini sangat rentan menimbulkan ketidakstabilan politik. Berbekal alasan itulah kemudian intervensi atas tatanan politik Bali dilakukan pemerintah kolonial melalui perubahan ketatanegaraan dengan menjadikan Bali sebagai wilayah kekuasaan langsung (*direct ruled*). Sejumlah raja yang dianggap tidak becus dilengserkan dan diganti dengan orang-orang potensial, sedangkan mereka yang dianggap berbahaya diasingkan (Robinson, 2006).

Penerapan sistem pemerintahan langsung ini tidak bertahan lama. Sejumlah pemikir Belanda melihat intervensi keterlaluan Batavia atas Bali menyebabkan pemerintahan di wilayah ini kehilangan dimensi spiritualnya dan menjadikannya sekedar persoalan teknis penguasaan semata. Hal ini menjadikan cita-cita untuk memelihara keamanan dan ketertiban menjadi suatu usaha yang sulit diwujudkan, karena dalam pandangan mereka harmoni dalam masyarakat Bali sangat tergantung pada karisma spiritual seorang pemimpin.

Lebih dari itu, seperti yang telah diuraikan oleh Robinson, alasan politis yang mendasari perubahan ini adalah derajat integrasi dengan Jawa yang semakin tinggi di mana gagasan nasionalisme tengah menjadi isu panas. Pengaruh Jawa ini ditandai oleh meluasnya Islam dan masuknya paham komunisme.⁹ Di sisi lain, melorotnya otoritas tradisional membuka pintu bagi partisipasi masa yang lebih luas dalam politik sehingga tata tentram suasana damai dan apolitik seperti lumrahnya imajinasi penguasa kolonial atas Baliterganggu. Adapun secara ekonomis, pemerintahan langsung semacam ini tentu tidak menguntungkan karena memerlukan biaya operasional yang sangat mahal.

Berangsur-angsur pemerintah kolonial mengembalikan otoritas lama para penguasa tradisional kepada posisi semula melalui dua tahap. Pada dekade kedua abad ke-20, pemerintah kolonial menngembalikan kuasa simbolik para raja dengan mengizinkan mereka kembali menggunakan symbol-simbol kekuasaan tradisional semisal gelar. Para raja juga

⁸ Adrian Vickers 14

⁹ Terdapat diskusi panjang mengenai persoalan Islam di Bali yang menunjukkan bahwa saat itu menguatnya pengaruh Islam di Bali dianggap sebagai bahaya. Sejumlah kalangan pemikir Belanda mengusulkan untuk menahan penetrasi Islam melalui gerakan *missie* dan *zending*. Salah satu usaha yang kemudian ditempuh ialah menginkorporasikan Bali yang secara geografis sangat dekat dengan Jawa ke dalam Pemerintahan Timur Besar (*gouvernement van de groote oost*). Untuk uraian yang lebih menarik dan lengkap lihat dalam Nyoman Wijaya, *Serat Salib dalam lintas Bali: Sejarah Konversi Agama di Bali 19312001*, edisi kedua (Denpasar: Yayasan Samaritan, 2007) hlm. 58-69.

mulai berperan sebagai kepanjangan tangan penguasa kolonial dengan gelar *state-houder*. Memasuki pertengahan tahun 1930an, perubahan tata-pemerintahan Bali semakin jelas ketika para raja memperoleh kembali otoritasnya secara resmi untuk memimpin wilayah yang merupakan *zelfbesturen landschapen*. Status ini bukan hanya memperkenankan para raja untuk mempraktekan kembali kuasa tradisional mereka tetapi juga mengizinkan mereka untuk memperoleh sejumlah uang sebagai kompensasi. Dengan demikian rakyat Bali kembali masuk dalam tatanan tradisional lama mereka dan disisi lain otoritas pusat, termasuk didalamnya partisipasi masa dalam politik, hilang digantikan oleh *brokered authority*. Kegagalan reformasi birokrasi kolonial yang sangat mempercayai instrumen modern dan mengutamakan pada pencapaian (*achievement*) ketimbang meritisme, mengembalikan kasta menjadi penentu utama bagi penciptaan hirarki di Bali.

IV. NUSA DAN BANGSA BALI

Diskusi mengenai perkembangan wacana kebangsaan terlihat sejak dekade kedua abad ke-20. Terdapat dua elemen penting yang hingga derajat tertentu berpengaruh dalam membentuk orientasi politik dan gagasan kebangsaan di Bali meliputi pendidikan dan perkembangan organisasi. Meskipun sekilas memiliki pola serupa dengan perkembangan di tempat lain, gagasan kebangsaan yang dihasilkan melalui proses ini tidaklah sama.

Seperti halnya Jawa, memasuki abad ke-20 mulai didirikan sekolah-sekolah di pulau ini. Hanya saja sekolah yang ada, yang tentunya terbatas dalam segi jumlah, juga tidak dengan mudah diakses oleh masyarakat luas. Struktur kasta yang dikenal dalam masyarakat Bali mempersempit akses bagi kaum *jaba* (*sudra*) untuk memperoleh pendidikan lanjut. Sedangkan sejumlah elit dari golongan *triwangsa* cenderung lebih dapat memanfaatkan peluang ini dengan leluasa. Sebagian anak raja atau para bangsawan cukup beruntung karena dapat memperoleh pendidikan lanjut hingga jenjang yang cukup tinggi, di antaranya adalah Anak Agung Gde Agung yang bersekolah di Jawa dan Tjokorda Gde Raka Soekawati di Perancis.¹⁰

Perkembangan sekolah di Bali banyak bergantung pada kebijakan pemerintah kolonial. Sejak 1914 hingga 1920an terdapat sekitar 94 sekolah yang didirikan pemerintah.¹¹ Sebagian besar diantaranya diantaranya berada di Bali utara (Buleleng/Singaraja) termasuk *Hollande Indische School* (HIS), *Hollandsche Chinese School* (HCS), *Europesche Lagere School* (ELS) dan *Normaal Cursus* yang ditujukan untuk mempersiapkan calon guru.¹²

Inisiatif pengembangan sekolah yang datang dari luar pemerintah terutama oleh kelompok keagamaan banyak terkendala oleh adanya besarnya kekhawatiran dan rasa curiga akan adanya pengaruh asing yang dianggap dapat merusak atau mengganggu agama dan tradisi asli Bali. Salah satu contohnya ialah perdebatan panjang mengenai pembangunan HIS oleh *Politiek Economish Bond* (PEB) yang disinyalir akan menjadi pintu masuk bagi pengaruh Agama Katholik Roma (*Bali Adnjana*, No. 16, 1 Juni 1925: 4. Nyoman Wijaya, 2007 42-3).

Selain persoalan keterbatasan akses, masalah dalam perkembangan pendidikan di Bali juga akibat penerapan *Balisering* (Balinisasi) pada tahun 1920-an yang cenderung anti modernitas. *Balisering* merupakan suatu proyek kolonial yang didukung oleh para ahli Bali seperti Kron, Roelof Goris dan Walter Spies untuk menjadikan Bali semacam museum hidup dimana adat dan tata nila tradisional dipelihara dan diterapkan dalam keseharian, misalkan

¹⁰ Riwayat mengenai Anak Agung Gde Agung dapat dilihat dalam memoarnya yang berjudul *Kenangan Masa Lalu*. Adapun profil singkat mengenai Tjokorda Soekawati dimuat dalam *Penjoeleoh Bali* 10 Januari 1947.

¹¹ Angka ini diperoleh dari kompilasi data H.T. Damste, "Bali Splinter Zending" *Koloniaal Tijdschrift* 13 (1924) hlm. 532-3 dan L.U. Stenis, *Memorie van Overgave van het gewest Bali en Lombok* (April 1919) dalam Nyoman Wijaya, *Serat Salib*, hlm.51-2

¹² L.U. Stenis, *Memorie van Overgave van het gewest Bali en Lombok* (April 1919) dalam Nyoman Wijaya, *Serat Salib*, hlm. 51-2

melalui arsitektur; tata karma berbicara; busana; dan tarian (Aridka, dkk., 2013: 48896; Last, 1955: 49; Robinson, 2006:75). Sebagai kebijakan *Balisering* membawa konsekwensi bahwa sejumlah matapelajaran yang dianggap tidak memuat nilai-nilai tradisional mengalami pengurangan porsi hingga nyaris hilang.

Dalam kejumudan semacam ini muncullah gerakan Tamansiswa sebagai cabang dari gerakan Tamansiswa yang dipelopori Ki Hadjar Dewantara di Yogyakarta pada tahun 1933. Seorang Bangsawan Jawa bernama Wiyono Suryokusumo (juga dikenal sebagai Soeriakusumo) yang disebut-sebut datang dan menetap di Denpasar setelah kunjungan Mangkunegara VII ke Bali menjadi tokoh paling penting dalam hal ini.¹³ Keberadaan Tamansiswa berhasil mencetak sejumlah besar intelektual baru di Bali yang berasal dari rakyat jelata. Begitupula dengan peran Suryokusumo tidak hanya menjadi suplemen bagi kemajuan pendidikan namun juga menjadi jalur penting untuk pemekaran gagasan nasionalisme dari Jawa pada akhir kolonial dan masa perang.

Kemunculan kelompok terdidik sebagai buah manis dari perluasan dan perbaikan pendidikan malah memunculkan perdebatan. Terutama, respon terhadap keberadaan golongan *jaba* yang secara massif hadir sebagai kaum terdidik dan, terlebih lagi, sebagian besar dari mereka kemudian bekerja sebagai guru di sekolah rakyat. Sejumlah orang dari kelompok triwangsa mengkhawatirkan para guru dari kelompok *jaba* sebagai penyimpangan dari tradisi. Para *jaba* terdidik itu tetap dianggap tidak pantas menjadi guru atas dasar perbedaan kelas. Ajaran mereka bahkan dianggap dapat membahayakan anak-anak kelompok triwangsa yang menjadi siswa.

Menyikapi perkembangan pendidikan di mana banyak guru yang berasal dari golongan *Jaba*, Bali Adnjana melalui terbitanya memuat artikel yang mewanti-wanti bangsa Bali untuk berhati-hati terhadap para guru dari kaum sudra. Disebutkan bahwa, walaupun mereka mengenyam pendidikan namun para guru ini juga manusia yang bisa berbuat salah, terlebih lagi mereka berasal dari kelompok yang rendah (*Bali Adnjana*, No. 25, 1 September 1927).

Di samping merefleksikan hegemoni sistem kasta, persoalan ini juga merekam dinamika pergerakan organisasi di Bali pada paruh pertama abad ke-20.

Perkembangan nasionalisme Indonesia dapat dijelaskan melalui dua fase yakni nasionalisme kultural yang kemudian mengkristal menjadi nasionalisme politik. Nasionalisme kultural ditandai dengan munculnya sejumlah oorganisasi kedaerahan seperti Boedi Oetama, Jong Java, dan Pasundan. Gagasan kebangsaan yang utuh, sebagai Indonesia, kemudian muncul pada dekade kedua abad ke-20 ketika Soewardi Soeryaningrat (Ki Hadjar Dewantara) menggunakan konsep kebangsaan Indonesia selama berada di pembuangan. Pada 1917, untuk kali pertama, Sukarno menggunakan istilah Indonesia dalam pidatonya di hadapan publik yang menekankan pentingnya persatuan atas cita-cita bersama (Elson, 2008: 30).

Di Bali, terdapat dua pola utama yang memungkinkan persemaian gagasan kebangsaan di Bali yakni dibawa oleh organisasi lokal maupun organisasi nasional (Jawa) yang melebarkan pengaruhnya hingga wilayah ini. Salah satu organisasi yang paling awal didirikan adalah Setiti Bali yang muncul sebagai reaksi meluasnya Sarikat Islam. Organisasi didirikan yang memiliki tujuan utama untuk memajukan adat, dan agama Hindu serta bergiat dalam bidang ekonomi (Ardhika dkk., 2013: 478). Setiti Bali tidak berusia panjang karena ditutup pemerintah. Sebagai gantinya dibentuk Suita Gama Tirta yang bertujuan sama dengan Setiti Bali, namun organisasi baru ini juga tidak bertahan lama karena tidak diterima masyarakat.

¹³ Suryokusumo memperoleh gelar "*Dane*" sebutan yang hanya disematkan kepada *Weisya*. Ia dikenal sebagai guru Theosofi yang memiliki sejumlah murid seperti I Gusti Ktut Djlantik yang ajarannya menunjukkan konfergensi Hindu-Budha. Nyoman Wijaya, *Serat Salib*, hlm.454.

Sejumlah pemuda Bali yang bersekolah di Jawa berkontribusi besar pada pendirian Boedi Oetomo (BO) di Bali pada 1920. Keberadaan BO di pulau ini tidaklah populer. Sejumlah alasan yang berusaha menjelaskan tidak meluasnya pengaruh BO di Bali adalah karena faktor tingkat pendidikan yang masih rendah sehingga rakyat susah mencerna gagasan dan program dari BO (Ardika dkk., 2013: 478-8). Selain itu, sebenarnya perlu pula ditinjau lebih lanjut adanya alternatif alasan yang lain. Pertama, perhubungan dan orientasi kemajuan seperti yang ada di Jawa bertolak belakang dengan kondisi Bali dimana feodalisme sedang dipulihkan. Kedua, gagasan BO yang tulang punggung gerakannya adalah priyayi metropolitan Jawa yang mengalami perluasan wawasan melalui pendidikan ala barat juga berlawanan dengan pola umum di Bali yang dicekam kekhawatiran terhadap pembaharuan dan pengaruh luar.

Meskipun demikian, BO turut menginspirasi munculnya organisasi serupa, yang berbasis pada elit, yakni Perkumpulan Shanti Adnjana. Mencermati kemunculannya, Perkumpulan Shanti Adnjana ini lebih merupakan bentuk baru dari perkumpulan tradisional yang telah ada jauh sebelumnya yakni *Sekeha (Seka) Djongkok* yang merupakan perkumpulan simpan pinjam yang ada di setiap banjar. Adapun *Sekeha Jongkok* kemungkinan bukanlah nama dari suatu organisasi tertentu melainkan perkumpulan yang diadakan oleh sesama warga suatu banjar. Istilah *Sekeha (Seka)* sendiri telah ada dan digunakan sejak jaman pra-aksara untuk menyebut perkumpulan (Lihat dalam *Djatajoe*, No.9, Th. 3, 25 April 1939, hlm.265-271).

Usia perkumpulan Shanti Adnjana juga tidak panjang, hanya mampu bertahan hingga 1924, dua tahun setelah dibentuk. Organisasi ini bubar karena terjadi perpecahan di antara para penggiatnya yang bermuara pada persoalan kasta. Pecahan Perkumpulan Shanti terpecah menjadi Bali Adnjana dan Suryakanta. Organisasi pertama merupakan kumpulan golongan triwangsa (Brahmana, Ksatria dan Weisya) yang berusaha meneruskan Shanti Adnjana. Adapun Suryakanta merupakan organisasi yang membela nasib kaum *jaba (Bali Adnjana*, Minggu 1 Januari 1928:1).

Perdebatan antara kedua kelompok ini menunjukkan adanya kesadaran politik dan hingga derajat tertentu gagasan kebangsaan yang tengah berkembang di Bali. Disandingkan dengan organisasi lain yang telah ada, Suryakanta dapat ditempatkan dalam spektrum paling progresif. Salah satu motor gerakan Suryakanta yakni I Negah Metra merupakan tipe elit-*jaba* terdidik yang bertugas sebagai guru HIS. Organisasi ini sangat membuka diri atas perubahan dan hal-hal baru. Sekalipun organisasi ini menyatakan secara resmi bukanlah sebagai gerakan politik, Suryakanta cukup artikulatif dalam merespon perkembangan politik waktu itu misalkan melalui analogi yang meperbandingkan kemajuan di Bali dan Jawa. Suryakanta mampu mengartikulasikan gagasan mereka terutama mengenai despotisme dan kesadaran kelas secara jelas dalam menuntut emansipasi kaum *jaba* dalam caturwangsa.¹⁴ Kelompok ini melihat "*Bali yang ketjil juga terpentjil*" untuk merefleksikan keterbelakangan masyarakat yang dimana kemajuan dihambat antara lain oleh adat dan agama, termasuk didalamnya adalah kesewenang-wenangan kasta. Suryakanta melihat bahwa pendidikan yang merata juga untuk perempuan dan dapat dijangkau merupakan investasi penting bagi kemajuan bangsa.¹⁵ Kelompok ini mengkritik keras perlakuan sewenang-wenang kaum triwangsa atas golongan *Jaba* dan sejumlah praktek adat dan agama yang bersifat menindas dan diskriminatif misalkan larangan perkawinan dengan kasta bawah.¹⁶

Berbeda dengan Suryakanta, Bali Adnjana jauh lebih konservatif dengan

¹⁴ Terdapat pula usulan untuk mempopulerkan penyebutan *jaba* daripada *sudra*.

¹⁵ SN

¹⁶ Kisah cinta I Negah Metra yang berasal dari kelompok *jaba* merupakan contoh tepat untuk menggambarkan rumitnya pernikahan berdasar adat yang sangat dbatasi oleh kasta. Metra melanggar peraturan yang ada dengan menikahi perempuan dari kasta Brahmana bernama I Dayu dari Grya Mas Singaraja. Akibat dari pelanggaran itu, ia menjalani *selong* (hukuman pembuangan). Adapun dalam kasus ini, Metra dipindahkan oleh penguasa kolonial ke Lombok. Lihat dalam (Agung, 2001:127)

mempertahankan hegemoni kasta dari serangan rivalnya dan terlihat sangat afirmatif terhadap penguasa kolonial. Bali Adnjana membangun persepsi tentang Suryakanta sebagai gerakan komunis yang berusaha menghancurkan tatanan adat yang sudah mapan (Bali Adnjana 16, Juni 1926: 4). Tampaknya peringatan akan bahaya gerakan merah di Bali bukan hanya ditujukan kepada pembaca dari kalangan rakyat, namun lebih dari itu, isu ini juga diarahkan untuk menarik perhatian penguasa kolonial yang memiliki kekhawatiran yang sama akan pengaruh komunisme di pulau ini. Bali Adnjana merupakan kelompok yang berterimakasih kepada penguasa kolonial yang telah mengembalikan keaslian Bali. Mereka melihat bahwa kemajuan bangsa Bali terletak pada adat dan tradisinya bukan pada nilai-nilai asing. Kelompok ini menyalahkan pendidikan modern yang dituduh melahirkan kelompok intelektual setengah matang yang berbahaya dan tidak tahu adat (*Bali Adnjana*, No. 25, 1 September 1927).

Selain berdebat soal kasta, kedua kelompok ini memiliki orientasi politik yang berbeda. Ketika restrukturisasi administrasi pemerintahan akan dilaksanakan dengan menggabungkan Bali dalam unit administratif *de Grootte Oost* (Timur Besar) atau Jawa, Suryakanta memilih untuk bergabung dengan Jawa, yang sangat cocok untuk dijadikan kiblat bagi kemajuan bangsa Bali. Kelompok ini beralasan bahwa ikatan primordial dengan Jawa lebih kuat karena orang Bali merupakan keturunan Majapahit, memiliki bahasa dan aksara yang sama. Adapun di lain pihak, menurut Suryakanta terdapat pula persoalan teknis akses terhadap Makasar terbatas (*Suryakanta*, No.5, Thn III, 49-50). Suryakanta berharap penggabungan dengan Jawa dapat membuka Bali dan mengemansipasi masyarakatnya terutama dari kalangan bawah.

Bali Adnjana, dalam kasus ini, memilih Celebes (Sulawesi) karena terdapat kesamaan tingkat kemajuan dimana baik Bali maupun Celebes berada pada tingkat yang relatif sama dan tidak tidak semaju Jawa. Mereka berkeyakinan bila dibanding dengan wilayah *de Grootte Oost* lainnya, Bali dapat dikatakan lebih maju, sedangkan Bali telah tertinggal jauh dengan Jawa. Dengan membuat perumpamaan suatu kapal, redaktur Bali Adnjana beralasan bahwa kapal Bali akan karam jika dinahkodai seperti kapal Jawa (*Bali Adnjana*, 20 April 1927, thn IV, p.4). Aspirasi Bali Adnjana ini tentu terdengar menggembirakan bagi para pejabat pemerintah kolonial yang mulai mencemaskan pengaruh nasionalisme Jawa menjalar hingga Bali. Seperti yang diterangkan oleh Robinson (2006), para pejabat Belanda seperti Damste dan Couvreur berusaha untuk mengalienasi Bali dari Jawa yang mereka sadari memiliki sejumlah kedekatan dengan Bali untuk membendung pengaruh Islam dan ide-ide nasionalisme (Robinson, 2006: 55-64). Oleh karena kekhawatiran semacam itulah semenjak 1925, para pelajar Bali hanya dapat diterima di Makasar dan Lombok namun dilarang bersekolah ke OSVIA di Jawa (Probolinggo) (*Suryakanta*, 3-4, Maret-April 1927: 33-34).

Meskipun Suryakanta dan Bali Adjana saling berlawanan, terdapat titik temu yang menyatukan keduanya yakni gagasan mereka mengenai bangsa dan tanah air (diistilahkan dengan “noesa”). Baik Bali Adnjana maupun Suryakanta memahami bahwa apa yang disebut sebagai bangsa adalah bangsa Bali itu sendiri, bukan seperti gagasan yang sedang berkembang pesat di Jawa. Bagi Suryakanta bangsa adalah adalah bangsa “Bali yang utuh” yang mengakui caturwangsa sebagai integrasi golongan triwangsa dan jaba (*Suryakanta*, 1, I Oktober 1925). Adapun bangsa bagi Bali Adnjana haruslah sesuai dengan tradisi dan adat Bali, termasuk hegemoni kasta. Konsep tentang bangsa dalam bentuk etnonasionalisme semacam ini yang belum beranjak dari tahap perkembangan nasionalisme paling awal. Tidak hanya menjadi milik kedua kelompok ini, hampir semua organisasi lokal memiliki orientasi politik dan gagasan kebangsaan serupa.

Merespon perdebatan kasta yang menyeruak di Bali utara, pada 1926, berdirilah organisasi Tjatur-wangsa Dreya Gama Hindu Bali (Tjwadega Hindu Bali) yang dibentuk atas

inisiatif para tokoh, salah satunya adalah Raja Karangasem (Ardika dkk., 2013: 482). Meskipun menggunakan nama Tjatur-wangsa, Tjwadega Hindu Bali sebenarnya merupakan bentukan kelompok triwangsa di wilayah Bali Selatan (Robinson, 2006: 53). Organisasi ini menolak segala bentuk pecah-belah di antara warga Bali dan memilih untuk bergiat untuk kemajuan melalui pendidikan. Salah satu agenda pentingnya adalah mengantisipasi dampak buruk dari pendidikan modern dengan mengusulkan kepada pemerintah untuk memasukan pengajaran bahasa Kawi dan Bali, lontar, dan beragam keterampilan di sekolah (Ardika dkk., *ibid*).

Meskipun keberadaan Tjwadega Hindu Bali sama sekali tidak mengakhiri pertentangan antar kasta yang berhenti dengan sendirinya setelah Suryakanta berakhir pada 1927 dan Bali Adjana pada 1929, keberadaan Tjwadega Hindu Bali mengkonfirmasi salah satu spektrum pergerakan lokal yang berusaha menghindari dari keriuhan politik saat itu dengan bersikap hambar dan apolitik. Melalui terbitannya bertajuk *Bhawanagara* yang memperoleh sokongan dari kelompok Belanda yang ahli Bali organisasi ini memainkan peran antisipatif akan dampak buruk pertentangan kasta bagi kekuasaan kolonial (Robinson, 2006: 54). Dalam hal ini, pertentangan kasta yang menyingkap berbagai bentuk despotisme telah mengusik ketenangan penguasa kolonial yang lebih menginginkan terjaganya tata tentram dan kestabilan. Terlebih lagi, kesadaran kelas yang merupakan motor gerak kaum intelektual jelata Bali dikhawatirkan akan menjadi embrio dari munculnya kesadaran kebangsaan yang lebih luas yang oleh karena ketakutan inilah penguasa kolonial sangat mensponsori penciptaan identitas Bali.

Organisasi lain yang sangat penting untuk diteropong dalam menjelaskan genesis gagasan kebangsaan dan orientasi politik di Bali adalah Bali Dharma Laksana (BDL) yang memiliki publikasi bernama *Djatajoe*.¹⁷ BDL yang awalnya berpusat di Singaraja merupakan gabungan dua organisasi yang berorientasi pada kemajuan pendidikan yakni *Balische Studie Fond* dan Eka Laksana. Adapun ide mengenai modernitas dikaitkan erat dengan perbaikan pendidikan yang diterjemahkan dengan memberi bantuan finansial para pelajar yang sedang bersekolah di luar Bali; dan mengusahakan sarana pendidikan seperti sekolah dan buku bacaan (*Djatajoe*, 1938: 11718). BDL juga berhasil menggerakkan partisipasi kaum perempuan melalui Komite Badan Bunda yang melakukan perbaikan nasib kaum perempuan (Ardika dkk., 2013: 485).

Menyoal perkembangan politik kala itu, BDL yang sebenarnya lebih aktif dalam bidang sosial menekankan pada pentingnya berorganisasi bagi rakyat Bali. BDL mengkampanyekan arti penting persatuan sebagai cara paling tepat untuk mencapai kemajuan, “Bangsa Bali! Bersatulah Toean di bawah pandji (*vandel*) BDL... oentoek mendapat segala perbaikan jang patoet dan perloe bagi noesa dan bangsa Bali (*Djatajoe*, No. 10, 25 Mei 1939 (thn. 3) :312). Oleh sejumlah sejarawan, organisasi ini disebut-sebut memiliki gagasan nasionalis (Robinson 2006; 74.). Meskipun demikian, pada BDL dasarnya merupakan organisasi yang sangat mengadvokasi penciptaan identitas Bali asli melalui *Balisering* (*Djatajoe* No. 7 25 Februari 1940 hlm. 214-7) dan terlihat mendukung besarnya otonomi para *zelfbesturder* (*Djatajoe* No. 1, 25 Agustus 1939:2-3, 5).

Organisasi-organisasi yang ada umumnya bergerak pada bidang non-politik, sehingga sulit sekali mencari gagasan politik mereka mengenai penjajahan. Meskipun demikian, salah satu tulisan dalam *Djatajoe* berjudul “Menoedjoe Masyarakat Baroe” mengkonfirmasi hal ini.

“Telah 30 tahoen lamanja Bali dibawah pemerintahan Belanda, sekian lama poela Bali sebagai anak kandoengan jang masih menjoesoe, jang selalu meminta didikan dan

¹⁷ Nama Bali Dharma Laksana berarti: utama, kewajiban, dilakukan yang maknanya adalah “Kewajiban jang moelia paatoet dilakoekan oentoek Noesa dan oleh Bangsa Bali. *Djatajoe* No.11, 25 Juni 1939, (thn. 3) hlm. 346.

bimbingan sebagai seorang anak memboetoehkan pimpinan iboe. Atas kebijaksanaan pemerintah, Bali yang moela-moela dilipoeti oleh awan kegelapan, moelailah kelihatan bersinar terang (*Djatajoe*, No.7, Februari 1941, (thn.5) : 388).

Pernyataan di atas menunjukkan gagasan BDL yang bernada simpatik atas keberadaan penguasa kolonial di Bali. Artikel yang juga menunjukkan rasa terimakasih kepada penguasa kolonial ini menarik karena ditulis pada 1939 dan dipublikasikan pada 1941. Pada periode ini situasi politik negara kolonial tengah mengalami eskalasi akibat akumulasi kekecewaan para nasionalis Indonesia di Volksraad.¹⁸ Dalam jangka waktu tersebut, kelompok kooperatif Indonesia di Volksraad dengan sangat lantang menuntut hak sipil dan politik misalkan melalui Petisi Soetadjo, Mosi Wiwoho dan Thamrin, juga kampanye *anti-belasting* Soetomo.

Pada penghujung dekade 1930an organisasi pergerakan lokal yang cenderung apolitis mengalami sedikit perubahan dengan munculnya gerakan yang berjejaring nasional. Salah satunya adalah Budi Welas Asih (BWA) yang lebih menonjol dalam aktivisme politiknya disbanding organisasi lokal lainnya. Hal ini disebabkan oleh hubungan BWA dengan organisasi nasional berhaluan kooperatif, Parindra sejak 1937sebelum dr. Murdjani membentuk Parindra Bali sebagai satu-satunya organisasi politik pra-perang (Robinson 2006: 73). BWA banyak menyebarkan gagasan-gagasan nasionalisme yang disarikan dari tulisan-tulisan Sun Yat Sen, Soetomo maupun Wahidin, dan mengedarkan media cetak seperti *Suara Parindra*, *Mustika*, *Suara Theosofie*, dan *Takbir Mahabarata* (Robinson, 2006: 74). Melihat dari corak gerakan dan tempat tumbuh berkembangnya BWA dan kemudian Parindra di Bali, organisasi ini tampaknya memiliki kedekatan dengan kelompok kelas menengah terutama yang memiliki akses terhadap ekonomi. Hal ini berkaitan dengan kampanye tokoh-tokoh Parindra yang berusaha mendorong kemandirian ekonomi bumiputra (*zelfstandigheid*) sebagai bagian dari usaha meningkatkan daya tawar politik untuk menuntut pemenuhan hak-hak sipil.

Seperti halnya Taman Siswa, kemunculan BWA di paruh akhir periode kolonial menjadi penanda adanya orientasi politik sekaligus gagasan kebangsaan yang lebih luas dan tidak hanya terpaku pada persoalan domestik. Hanya saja, kehadiran oorganisasi berjejaring nasional semacam ini terbilang terlambat sehingga tidak dapat dilihat keberhasilannya dalam meformulasikan kesadaran kebangsaan Indonesia di Bali pada era kolonial. Meskipun demikian, perannya menjadi sangat penting di kemudian hari pada masa perang. Melalui organisasi tersebut, para pejuang Bali dapat membangun jaringan dengan kelompok bawah tanah masa Jepang dan kelompok republikan pada era revolusi. Hal ini dapat mengkonfirmasi kebenaran dari ketakutan para pejabat kolonial yang telah memperkirakan nasionalisme akan berkembang di pulau tersebut dengan adanya perhubungan dengan Jawa dan ketika kelompok intelektual Bali telah selesai dengan persoalan domestik mereka.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Studi mengenai kemunculan dan perkembangan ide-ide politik modern di Bali terutama yang berkaitan dengan kemunculan kesadaran kebangsaan menemukan kompleksitas yang berasal dari dalam masyarakat Bali itu sendiri. Batas-batas tegas yang mengatur hubungan sosial antar kelompok yang bersumber pada adat dan tradisi gagal ditembus oleh ide-ide progresif modern. Penetrasi kolonial yang datang agak terlambat di pulau ini praktis menjadikan rakyat Bali jauh lebih lama hidup di bawah despotisme lokal ketimbang penjajah

¹⁸ Lebih detail mengenai persoalan ini lihat dalam Susan Abeyasekere, *One hand clapping: Indonesian nationalists and the Dutch, 1939-1942*, Clayton: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1976.

Belanda. Oleh karenanya, sangat sering ditemukan nada-nada afirmatif, rasa terimakasih yang dialamatkan kepada penguasa kolonial.

Ketika di sejumlah tempat para bumiputra terdidik telah mampu melampaui sentimen primordial untuk memformulasikan kesadaran kolektif sebagai bangsa, kelompok terdidik Bali terutama dari kalangan jelata masih harus menembus batasan-batasan adat yang telah pakem sejak lama. Mereka merupakan kelompok progresif dan memiliki orientasi politik-kebangsaan yang lebih luas bersumber dari kesadaran kelas. Hanya saja matinya Suryakanta setahun sebelum sumpah pemuda diselenggarakan di Jawa menjadikan dinamika pergerakan Bali kembali pada situasi yang hambar dan tanpa gejolak, kondisi yang disebut asli dari Bali seperti yang sejak lama diimajinasikan oleh para pejabat kolonial.

Geoffrey Robinson (2006) barangkali benar dengan mengatakan bahwa penguasa kolonial berperan besar dalam memampat diskusi kebangsaan yang lebih luas di Bali. Dalam hal ini penciptaan kembali identitas Bali yang asli dan alineasi terhadap pengaruh dari luar, terutama Jawa, telah menjauhkan organisasi pergerakan di Bali pada isu-isu populer di tanah jajahan. Begitu pula dengan dipulihkannya otoritas tradisional menjadikan rakyat semakin sibuk dengan beban tanggungan yang harus dibayarkan kepada penguasa feodal dan semakin jauh dari akses terhadap partisipasi politik. Adapun kesadaran kebangsaan yang terbentuk lebih merupakan wujud dari ungkapan-ungkapan kesadaran primordial tentang bangsa Bali.

Di sisi lain, narasi mengenai orientasi politik dan gagasan kebangsaan di Bali ini mengkonfirmasi bahwa kesadaran kebangsaan Indonesia yang mekar dan berkembang pada paruh pertama abad ke-20 tidak wujud dari komitmen yang lahir dari kelompok elit terdidik semata, melainkan juga bersumber pada pengalaman historis yang bersifat emansipatif dan partisipatif. Emansipatif mensyaratkan perlakuan sama dan sederajat bagi semua orang, sedangkan partisipatif berarti mengizinkan keterlibatan semua orang. Kedua hal inilah yang tidak berhasil dicapai melalui pergerakan lokal di Bali.

B. Saran

Terlepas dari banyaknya kajian yang mengulas mengenai pergerakan nasional sebagai salah satu narasi terpenting dalam sejarah nasional Indonesia, tampaknya masih perlu dilakukan sejumlah kajian yang ditujukan untuk mengeksplorasi pendekatan dan cara pandang yang alternatif dan berusaha menjauh dari determinasi metropolitan. Salah satunya ialah dengan memberi ruang kajian terhadap sejumlah partikularitas seperti meneliti wilayah-wilayah dimana komitmen kebangsaan dan sentimen nasionalnya lemah atau hanya muncul samar-samar. Dengan demikian ragam variasi mekanisme yang menjadikan individu ataupun kelompok terinkorporasi kedalam suatu unit politik bernama negara bangsa dapat diidentifikasi dan dijelaskan.

DAFTAR PUSTAKA

Surat Kabar

Bali Adnjana, 16, Juni 1926; 20 April 1927; 1 Januari 1928; 1 Juni 1925; 1 September 1927; 1 September 1927.

Djatajoe, 25 Agustus 1939; 25 Juni 1939; 25 April 1939; 25 Mei 1939; 25 September 1939; 25 Februari 1940; Februari 1941.

Penjoeleoh Bali, 10 Januari 1947.

Suryakanta, 1 Oktober 1925; 3-4, Maret-April 1927; Suryakanta, No.5, Thn III.

Buku

- Abdulah, T., 2012. "Dari Hasrat Kemajuan ke Pembentukan Bangsa" dalam Muhamad Hisyam, I Ketut Ardhana (Eds), *Indonesia dalam arus sejarah*, vol 5, "Masa pergerakan kebangsaan" Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve; Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012. hlm. 62-95.
- Abeyasekere, S., 1976. *One hand clapping: Indonesian nationalists and the Dutch, 1939-1942*, Clayton: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University.
- Agung, A. Agung Gde Putra, 2001. *Perubahan Sosial dan Pertentangan Kasta di Bali Utara*, Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia.
- _____, 2009. *Peralihan sistem birokrasi dari tradisional ke kolonial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agung, I. Anak Agung Gde, 1993. *Kenangan masa lampau: Zaman kolonial Hindia Belanda dan zaman pendudukan Jepang di Bali.*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Anderson., R.O.G. Benedict, 1991. *Imagined communities: reflections on the.*
- Dwipayana, A.A.G.N Ari, 2004 . *Bangsawan dan kuasa: Kembalinya para ningrat di dua kota*, Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment.
- Elson, R. E., 2008. *The idea of Indonesia: A history*, Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press.
- Feith, H., 1962. *The decline of constitutional democracy in Indonesia*. Ithaca N.Y.: Cornell University Press.
- Geertz, C., 1980. *Negara: The theatre state in nineteenth-century Bali*, Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- Kartodirdjo, S., 1998. *Pengantar sejarah Indonesia baru, sejarah pergerakan nasional. Jilid 2, Dari kolonialisme sampai nasionalisme*, Jakarta: Gramedia.
- Last, Jef., 1955. *Bali in de kentering*, Amsterdam: Bezige Bij.
- Magenda, B., 1991. *The Decline of the Traditional Aristocracy*, Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, Cornell University.
- Nordholt, H. S., 1990, "Staat, dorp en ritueel in Bali", *Antropologische verkenningen*, Vol. 9, No. 3 (1990), p. 32-48
- _____, 1996. *The spell of power: A history of Balinese politics, 1650-1940*, Leiden: KITLV Press.
- _____, 2011. 'Modernity and cultural citizenship in the Netherlands Indies: An illustrated hypothesis', *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 42, Issue 03, Oct. 2011, hlm. 435-57.
- Pendit, N. S., 1979. *Bali Berjuang*, Jakarta: Gunung Agung.
- Rahzen, T. dkk., 2007. *Tanah Air bahasa: Seratus jejak pers Indonesia*, Jakarta: Blora Institute, I:Boekoe.
- Robinson, G., 2006. *Sisi Gelap Pulau Dewata: Sejarah Kekerasan Politik*, Yogyakarta: LKIS.
- Van Bemmelen, S., 2011. Remco Raben., (Eds.) *Antara daerah dan negara: Indonesia tahun 1950-an: pembongkaran narasi besar integrasi bangsa*, Jakarta: YOI-Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie.
- Van Niel, R., 1984. *Munculnya elit modern Indonesia*, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Vickers, A., 2012. *Bali: A paradise created*, Tokyo: Tuttle Publishing.
- Wijaya, I Nyoman, 2013. *Serat Salib dalam lintas Bali: Sejarah Konversi Agama di Bali 1931/2001*, edisi kedua (Denpasar: Yayasan Samaritan, 2007) I Wayan Ardika, I Gde Parimartha, A.A. Bagus Wirawan [Eds] *Sejarah Bali: dari prasejarah hingga modern*, Denpasar: Bali Udayana University Press.